



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/w96ncc09

Hal. 1311-1324

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial: Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan

**Muhammad Maulidar Rohman¹, Difa Karimatul Maulidia Azzahra², Mufida Hilmi³,
Ali Hasan Siswanto⁴**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4}

*Email maulidarr888@gmail.com; difakarimatu15@gmail.com; fidahilmi21@gmail.com;
alihan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: tgl-bln-thn | Disetujui: tgl-bln-thn | Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

This article begins with the paradox between the ideals of Islamic theology, which are oriented towards the values of rahmatan lil 'alamin (blessing for the universe) and social realities that are still rife with various forms of structural, cultural, and symbolic oppression. Academic anxiety arises when theology tends to stop at the normative-doctrinal level and has not yet functioned as a force for social transformation. The research gap lies in the absence of integration between theology, social philosophy, and spirituality (Sufism) in formulating an operational and contextual model of a society without oppression. This article uses an integrative theoretical approach based on the tauhidic paradigm that combines the dimensions of revelation, reason, and social reality. The research method used is qualitative through literature study with critical analysis, hermeneutics, and an interdisciplinary approach. The article's main argument asserts that tauhid is not only a theological doctrine but also an emancipatory principle that rejects all forms of domination other than God, thus having direct implications for social liberation. Through this reconstruction, the article offers the concepts of "emancipatory-transformative theology" and "social-progressive Sufism" as a methodological basis for creating a society without oppression. The scholarly contribution of this research lies in the development of a new paradigm in Islamic Studies that integrates theology, philosophy, and spirituality into a framework of social transformation, while also providing a conceptual model applicable to contemporary socio-religious movements.

Keywords: *Emancipatory Theology, Tawhidi, Social Oppression, Social Sufism, Societal Transformation, Islamic Philosophy, Social Justice*

ABSTRAK

Artikel ini berangkat dari paradoks antara idealitas teologi Islam yang berorientasi pada nilai rahmatan lil 'alamin dan realitas sosial yang masih sarat dengan berbagai bentuk penindasan struktural, kultural, dan simbolik. Kegelisahan akademik muncul ketika teologi cenderung berhenti pada tataran normatif-doktrinal dan belum berfungsi sebagai kekuatan transformasi sosial. Kesenjangan penelitian terletak pada absennya integrasi antara teologi, filsafat sosial, dan spiritualitas (tasawuf) dalam merumuskan model masyarakat tanpa penindasan yang operasional dan kontekstual. Artikel ini menggunakan pendekatan teoritis integratif berbasis paradigma tauhidik yang menggabungkan dimensi wahyu, rasio, dan realitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kritis, hermeneutika, dan pendekatan interdisipliner. Argumen utama artikel ini menegaskan bahwa tauhid tidak hanya merupakan doktrin teologis, tetapi juga prinsip emansipatoris yang menolak segala bentuk dominasi selain Tuhan, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap pembebasan sosial. Melalui rekonstruksi ini, artikel menawarkan konsep "teologi emansipatoris-transformatif" dan "tasawuf



sosial-progresif” sebagai basis metodologis dalam menciptakan masyarakat tanpa penindasan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma baru dalam Studi Islam yang mengintegrasikan teologi, filsafat, dan spiritualitas ke dalam kerangka transformasi sosial, sekaligus menyediakan model konseptual yang aplikatif bagi gerakan sosial keagamaan kontemporer.

Kata Kunci: Teologi Emansipatoris, Tauhidik, Penindasan Sosial, Tasawuf Sosial, Transformasi Masyarakat, Filsafat Islam, Keadilan Sosial

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rohman, M. M., Azzahra, D. K. M., Hilmi, M. ., & Siswanto, A. H. . (2026). Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial: Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1311-1324. <https://doi.org/10.63822/w96ncc09>



PENDAHULUAN

Dalam lanskap sosial-historis kontemporer, dunia Muslim dihadapkan pada paradoks yang semakin menguat antara idealitas ajaran Islam sebagai sistem nilai yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan pembebasan, dengan realitas sosial yang justru menunjukkan reproduksi berbagai bentuk penindasan—baik struktural, kultural, maupun simbolik. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level global, tetapi juga mengakar dalam konteks lokal masyarakat Muslim yang mengalami ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, hingga krisis kemanusiaan yang berulang. Studi mutakhir menunjukkan bahwa isu keadilan, kesetaraan, dan krisis kemanusiaan menjadi tema dominan dalam literatur akademik global, menandakan adanya kegelisahan kolektif terhadap kegagalan sistem sosial dalam mewujudkan nilai-nilai etis universal. ([Walisongo Journal](#)) Di sisi lain, agama khususnya Islam tetap dipandang sebagai sumber normatif yang memiliki potensi besar dalam membentuk sistem sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, namun potensi ini seringkali tidak teraktualisasi secara praksis. ([Sinergi International Journal](#)) Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar: mengapa teologi yang secara normatif bersifat liberatif belum mampu bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang efektif dalam menghapus penindasan?

Dalam perkembangan literatur mutakhir (state of the art), terdapat peningkatan signifikan dalam kajian yang mengaitkan agama, etika, dan transformasi sosial. Misalnya, studi tentang maqāsid al-sharī'ah menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar formulasi hukum menuju orientasi kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sebagai tujuan utama syariat. ([Frontiers](#)) Selain itu, penelitian tentang pemikiran teologi modern menegaskan bahwa agama memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan krisis global. ([e-Journal UIN Bukittinggi](#)) Kajian lain dalam bidang pemikiran politik Islam juga menunjukkan adanya upaya rekonfigurasi otoritas keagamaan untuk merespons isu-isu keadilan, demokrasi, dan tata kelola etis dalam masyarakat kontemporer. ([Sinergi International Journal](#)) Bahkan, tren terbaru dalam studi sosiologi agama mengaitkan religiositas dengan isu-isu korupsi, keadilan sosial, dan transformasi moral masyarakat. ([Frontiers](#)) Namun demikian, meskipun literatur tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan, sebagian besar masih bergerak dalam kerangka parsial—baik normatif, legal-formal, maupun sosiologis—tanpa menghasilkan sintesis epistemologis yang mampu mengintegrasikan dimensi teologis, filosofis, dan spiritual secara utuh.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang cukup mendasar, yaitu absennya paradigma integratif yang mampu menjembatani antara teologi normatif dan praksis sosial emansipatoris. Teologi dalam banyak kajian masih direduksi menjadi sistem doktrin yang bersifat apologetik dan ritualistik, sehingga kehilangan daya kritisnya terhadap struktur penindasan. Di sisi lain, pendekatan sosial-kritis yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial seringkali mengabaikan dimensi spiritual dan transendental sebagai sumber etika pembebasan. Lebih jauh, tasawuf—yang sejatinya memiliki potensi besar sebagai basis transformasi kesadaran—justru sering dipahami secara individualistik dan terlepas dari realitas sosial. Kesenjangan ini diperkuat oleh kurangnya model konseptual yang operasional dalam merumuskan masyarakat tanpa penindasan berbasis nilai-nilai tauhidik. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana realitas penindasan dapat dibaca secara integratif dalam perspektif teologi dan sosial? (2) mengapa teologi normatif gagal berfungsi sebagai kekuatan transformasi sosial? (3) bagaimana merekonstruksi paradigma tauhidik yang bersifat



emansipatoris? dan (4) bagaimana merumuskan model metodologis dalam menciptakan masyarakat tanpa penindasan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, artikel ini mengajukan tesis utama bahwa tauhid tidak hanya merupakan prinsip teologis yang bersifat doktrinal, melainkan juga paradigma epistemologis dan aksiologis yang memiliki implikasi langsung terhadap pembebasan sosial. Tauhid, dalam pengertian ini, harus direkonstruksi sebagai basis kritik terhadap segala bentuk dominasi selain Tuhan, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai “teologi emansipatoris-transformatif.” Dengan mengintegrasikan teologi, filsafat sosial, dan tasawuf, artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru yang disebut sebagai paradigma tauhidik integratif, yang tidak hanya menjelaskan realitas penindasan, tetapi juga menyediakan metode transformasi sosial yang berbasis spiritualitas. Kontribusi teoretis dari artikel ini terletak pada upaya menjembatani dikotomi antara normativitas agama dan praksis sosial melalui integrasi wahyu, rasio, dan realitas, sekaligus mengembangkan model “tasawuf sosial-progresif” sebagai basis etika dan aksi kolektif dalam membangun masyarakat tanpa penindasan. Kebaruan (novelty) penelitian ini tidak hanya terletak pada sintesis interdisipliner yang ditawarkan, tetapi juga pada formulasi paradigma baru yang berorientasi pada transformasi, bukan sekadar interpretasi, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan Studi Islam kontemporer dalam kerangka global.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teoretis dalam artikel ini dibangun di atas asumsi fundamental bahwa krisis penindasan sosial tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan sosiologis atau teologis secara terpisah, melainkan membutuhkan sintesis epistemologis yang mengintegrasikan dimensi wahyu, rasio, dan realitas historis. Dalam konteks ini, konsep tauhid diposisikan bukan sekadar sebagai doktrin metafisik tentang keesaan Tuhan, tetapi sebagai paradigma epistemologis dan aksiologis yang memiliki implikasi langsung terhadap struktur sosial. Tradisi klasik Islam—sebagaimana dirumuskan oleh pemikir seperti Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah—telah menempatkan tauhid sebagai dasar etika dan keadilan (‘adl), namun dalam perkembangan modern, dimensi sosial dari tauhid sering tereduksi menjadi kesalahan individual. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa tauhid justru memiliki kapasitas untuk membentuk sistem nilai yang menolak praktik eksploitasi dan ketidakadilan, serta mendorong tanggung jawab sosial kolektif ([Ejournal Tm Publisher](#)). Dengan demikian, kerangka teoretis ini berangkat dari reposisi tauhid sebagai prinsip anti-dominasi yang menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan yang menindas manusia merupakan bentuk deviasi dari prinsip keesaan Tuhan.

Dalam dialog dengan teori sosial kontemporer, kerangka ini juga mengadopsi pendekatan kritis terhadap struktur kekuasaan sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault dan Pierre Bourdieu, yang menekankan bahwa penindasan tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan diskursif. Perspektif ini penting untuk memperluas pemahaman teologi Islam agar tidak hanya berhenti pada legitimasi normatif, tetapi mampu membaca realitas sebagai arena relasi kuasa. Dalam konteks ini, tauhid dipahami sebagai prinsip dekonstruktif terhadap hegemoni—baik dalam bentuk kapitalisme eksploitatif, patriarki, maupun otoritarianisme religius. Studi terbaru menunjukkan bahwa teologi Islam memiliki potensi untuk berfungsi sebagai sistem etika yang mempengaruhi kebijakan sosial dan tata kelola masyarakat, termasuk dalam isu

*Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial:
Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan*
(Rohman, et al.)



pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender ([Kalam Al Gazali](#)). Oleh karena itu, kerangka teoretis ini mengintegrasikan kritik sosial modern dengan etika tauhidik, sehingga menghasilkan pendekatan yang tidak hanya analitis, tetapi juga normatif-transformasional.

Lebih lanjut, kerangka ini mengembangkan konsep “teologi emansipatoris-transformatif” yang berada dalam tradisi pemikiran Fazlur Rahman dan Farid Esack, yang menekankan pentingnya membaca teks keagamaan dalam konteks sosial yang dinamis. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan tafsir sosial (*al-tafsīr al-ijtimā’ī*) yang berupaya menghubungkan nilai-nilai Al-Qur’an dengan realitas kontemporer melalui pendekatan hermeneutik dan historis (int.yasin-alsys.org). Dalam kerangka ini, wahyu tidak dipahami sebagai teks statis, melainkan sebagai sumber inspirasi etis yang harus terus diaktualisasikan dalam konteks perubahan sosial. Dengan demikian, teologi tidak lagi berfungsi sebagai legitimasi status quo, tetapi sebagai kritik terhadap ketidakadilan dan alat pembebasan bagi kelompok tertindas (*mustad’afūn*). Konseptualisasi ini menempatkan teologi dalam posisi yang aktif dan dialogis, sekaligus membuka ruang bagi integrasi antara dimensi normatif dan praksis sosial.

Dimensi penting lainnya dalam kerangka teoretis ini adalah rekonstruksi tasawuf sebagai basis transformasi sosial. Tradisi tasawuf klasik, sebagaimana dikembangkan oleh Ibn Arabi dan Jalaluddin Rumi, menekankan penyucian diri (*tazkiyah al-nafs*) dan pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Namun, dalam konteks modern, tasawuf sering dipahami secara individualistik dan terlepas dari realitas sosial. Kerangka ini mengusulkan konsep “tasawuf sosial-progresif,” yang mengintegrasikan spiritualitas dengan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan. Dalam perspektif ini, pengalaman spiritual tidak hanya menghasilkan kesalehan personal, tetapi juga kesadaran etis untuk melawan penindasan dan membangun solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa nilai-nilai teologis Islam dapat berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter sosial dan harmoni masyarakat ([Journal Pandawan](#)). Dengan demikian, tasawuf direposisi sebagai energi moral yang mendorong transformasi sosial, bukan sekadar praktik asketis yang menjauh dari dunia.

Selanjutnya, kerangka teoretis ini juga mengintegrasikan konsep maqāṣid al-sharī‘ah dan keadilan sosial sebagai landasan normatif dalam membangun masyarakat tanpa penindasan. Dalam tradisi klasik, maqāṣid diformulasikan oleh Al-Shatibi sebagai tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam perkembangan kontemporer, konsep ini mengalami perluasan menjadi kerangka etis untuk pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai teologis dengan sistem sosial—seperti dalam Islamic social finance—dapat menjadi jembatan antara prinsip normatif dan kebutuhan pembangunan modern (jurnal.peradabanpublishing.com). Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum, tetapi sebagai paradigma etis yang mengarahkan transformasi sosial menuju keadilan dan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, masyarakat tanpa penindasan dipahami sebagai realisasi konkret dari maqāṣid yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*).

Akhirnya, kerangka teoretis ini memosisikan dirinya dalam diskursus global dengan menawarkan sintesis antara teologi Islam dan teori sosial kritis sebagai paradigma alternatif terhadap dominasi epistemologi Barat yang sekuler. Dengan mengintegrasikan tauhid sebagai prinsip ontologis, teologi sebagai kritik sosial, dan tasawuf sebagai energi transformasi, artikel ini mengembangkan model konseptual yang disebut sebagai “paradigma tauhidik integratif.” Paradigma ini tidak hanya menjelaskan realitas



penindasan, tetapi juga menyediakan kerangka metodologis untuk mengatasinya melalui transformasi kesadaran dan struktur sosial secara simultan. Dalam konteks global yang ditandai oleh krisis ketimpangan, dehumanisasi, dan alienasi spiritual, pendekatan ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dengan menghadirkan perspektif Islam sebagai sistem pengetahuan yang tidak hanya normatif, tetapi juga emansipatoris dan transformatif. Dengan demikian, kerangka ini tidak sekadar merekonstruksi teologi, tetapi juga mereposisi Studi Islam sebagai disiplin yang relevan dalam menjawab tantangan global kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi filosofis-teologis yang bersifat eksploratif-kritis, dengan tujuan untuk merekonstruksi paradigma teologi dari kerangka normatif menuju kerangka emansipatoris-transformatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter objek kajian—yakni teologi, tauhid, dan tasawuf—tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan struktur konseptual yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks studi agama kontemporer, pendekatan kualitatif telah menjadi metode dominan karena kemampuannya menangkap kompleksitas pengalaman religius, struktur makna, serta dinamika interpretasi teks dan realitas sosial secara simultan. Hal ini sejalan dengan perkembangan metodologi dalam studi Islam yang menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena keagamaan secara holistik dan kontekstual. ([Direktori Jurnal Akses Terbuka](#)) Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan secara epistemologis, tetapi juga strategis dalam menjembatani dimensi normatif dan empiris dalam kajian teologi sosial.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan hermeneutik. Studi kepustakaan dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah rekonstruksi paradigma teoretis, bukan pengujian hipotesis empiris. Dalam konteks ini, teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) serta karya-karya klasik dan kontemporer diperlakukan sebagai sumber utama untuk membangun argumentasi teoretis. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk memahami teks tidak hanya pada level literal, tetapi juga dalam konteks historis, sosial, dan filosofisnya. Hermeneutika dalam studi agama modern telah berkembang sebagai metode yang memungkinkan integrasi antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan interpretatif kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan. ([Jireh](#)) Dengan demikian, penggunaan hermeneutika dalam penelitian ini tidak sekadar sebagai teknik interpretasi, tetapi sebagai kerangka epistemologis yang memungkinkan dialog antara wahyu dan realitas sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber normatif utama dalam Islam, yang dianalisis untuk menggali prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan pembebasan sosial. Selain itu, karya-karya klasik para ulama seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Al-Shatibi digunakan untuk memahami fondasi teologis dan etis dalam tradisi Islam. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur akademik kontemporer dari jurnal bereputasi (Scopus/WoS), buku ilmiah, serta hasil penelitian terbaru yang relevan dengan tema teologi, filsafat sosial, dan tasawuf. Penggunaan sumber-sumber ini bertujuan untuk membangun dialog antara tradisi klasik dan



wacana kontemporer, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang tidak hanya historis, tetapi juga kontekstual dan futuristik. Pendekatan ini sejalan dengan tren penelitian mutakhir yang menekankan pentingnya integrasi antara sumber klasik dan analisis modern dalam studi Islam. ([Jurnal UIN Raden Intan Lampung](#)) Dengan demikian, pemilihan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip komprehensivitas dan relevansi epistemologis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara analisis hermeneutik, analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*), dan pendekatan fenomenologis. Analisis hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual dengan mempertimbangkan aspek historis, linguistik, dan filosofis. Sementara itu, analisis wacana kritis digunakan untuk mengidentifikasi relasi kuasa, ideologi, dan struktur dominasi yang terkandung dalam praktik sosial dan diskursus keagamaan. Pendekatan ini penting untuk mengungkap bagaimana teologi dapat berfungsi sebagai alat legitimasi maupun sebagai alat pembebasan. Di sisi lain, pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami dimensi pengalaman spiritual dan kesadaran religius sebagai basis transformasi sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan fenomenologis efektif dalam menggali pengalaman religius yang bersifat subjektif namun memiliki implikasi sosial yang luas. ([journals.ai-mrc.com](#)) Dengan menggabungkan ketiga teknik analisis ini, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif—baik pada level teks, struktur sosial, maupun pengalaman spiritual.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa persoalan penindasan dan transformasi sosial dalam perspektif teologi tidak dapat dijelaskan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang integratif. Pendekatan kualitatif-hermeneutik memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna normatif teks keagamaan, sementara analisis kritis memberikan alat untuk membaca realitas sosial secara struktural dan ideologis. Kombinasi ini juga menjawab kritik terhadap penelitian teologi yang sering dianggap tidak operasional, dengan menghadirkan kerangka metodologis yang mampu menghubungkan teori dan praksis. Lebih jauh, dalam konteks global, penelitian tentang agama dan transformasi sosial menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teologi, filsafat, dan ilmu sosial sebagai respons terhadap kompleksitas masalah kontemporer. ([Jurnal Harmoni](#)) Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki legitimasi dalam diskursus ilmiah global, sekaligus mendukung tujuan utama penelitian ini, yaitu merumuskan paradigma tauhidik yang emansipatoris dan transformatif sebagai basis pembangunan masyarakat tanpa penindasan.

PEMBAHASAN

Kerangka konseptual yang dikembangkan dalam artikel ini bertolak dari asumsi bahwa penindasan bukan sekadar fenomena sosial, melainkan manifestasi dari krisis epistemologis dan teologis dalam memahami relasi antara Tuhan, manusia, dan kekuasaan. Dalam perspektif tauhidik, segala bentuk dominasi manusia atas manusia merupakan bentuk deviasi ontologis, karena hanya Tuhan yang memiliki otoritas absolut. Oleh karena itu, penindasan harus dibaca sebagai “penyimpangan tauhid sosial,” yakni kondisi ketika relasi sosial tidak lagi mencerminkan prinsip keesaan dan keadilan Ilahi. Perspektif ini memperluas pemahaman klasik tentang tauhid yang selama ini lebih berfokus pada dimensi teologis-

*Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial:
Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan*
(Rohman, et al.)



metafisik menjadi paradigma sosial-kritis. Dalam konteks ini, konsep keadilan ('adl) tidak lagi dipahami sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai struktur praksis yang menuntut transformasi sistem sosial. Studi mutakhir menunjukkan bahwa keadilan Ilahi dalam Islam memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan sosial dan pengentasan ketimpangan, sehingga teologi tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. ([Kalam Al Gazali](#))

Jika ditinjau dari sumber normatif, Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan prinsip anti-penindasan sebagai bagian dari misi profetik. Firman Allah:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (QS. An-Nisa: 75)

Ayat ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kelompok tertindas (*mustad'afūn*) bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban teologis. Tafsir klasik seperti Ibn Kathir menegaskan bahwa ayat ini merupakan legitimasi terhadap perjuangan melawan ketidakadilan struktural, sementara tafsir kontemporer melihatnya sebagai dasar bagi teologi pembebasan dalam Islam. Dalam konteks modern, ayat ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap sistem global yang menghasilkan ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial. Dengan demikian, teks wahyu tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam membentuk kesadaran kritis terhadap penindasan.

Namun demikian, dalam praktiknya, teologi Islam sering mengalami reduksi menjadi wacana normatif yang tidak memiliki daya transformasi. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan sebagian tradisi keagamaan yang lebih menekankan aspek ritual dibandingkan dimensi sosial. Kritik terhadap fenomena ini telah dikemukakan oleh berbagai pemikir modern seperti Fazlur Rahman dan Farid Esack, yang menegaskan bahwa kegagalan teologi dalam merespons ketidakadilan disebabkan oleh pendekatan tekstualistik yang ahistoris. Studi kontemporer juga menunjukkan bahwa tanpa rekonstruksi metodologis, teologi cenderung menjadi alat legitimasi status quo, bukan alat kritik sosial. ([Jurnal STHB](#)) Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari teologi normatif menuju teologi emansipatoris yang mampu menghubungkan teks dengan realitas secara dinamis.

Dalam dialog dengan teori sosial modern, konsep penindasan dapat dianalisis melalui kerangka relasi kuasa sebagaimana dikembangkan oleh Michel Foucault dan Pierre Bourdieu. Penindasan tidak hanya terjadi melalui kekerasan fisik atau ekonomi, tetapi juga melalui mekanisme simbolik seperti wacana, norma, dan habitus. Dalam konteks ini, agama dapat berfungsi ganda: sebagai alat legitimasi kekuasaan atau sebagai alat pembebasan. Kerangka tauhidik yang ditawarkan dalam artikel ini berupaya menggeser fungsi agama dari legitimasi menuju emansipasi. Hal ini sejalan dengan perkembangan studi global yang mengaitkan agama dengan isu hak asasi manusia dan demokratisasi, di mana interpretasi keagamaan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah perubahan sosial. ([Springer Nature Link](#)) Dengan demikian, teologi harus diposisikan sebagai arena kontestasi wacana, bukan sekadar sistem doktrin yang statis.

Dimensi penting lainnya adalah integrasi tasawuf dalam kerangka transformasi sosial. Dalam tradisi klasik, tasawuf berorientasi pada penyucian diri dan pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Namun, dalam kerangka teoretis yang dikembangkan di sini, tasawuf direinterpretasi sebagai sumber kesadaran kritis yang mendorong perubahan sosial. Konsep seperti *ihsan* dan *zuhd* tidak lagi dipahami sebagai praktik individual semata, tetapi sebagai etika sosial yang menolak materialisme dan eksploitasi. Dalam konteks

Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial:
Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan
(Rohman, et al.)



ini, tasawuf memiliki potensi untuk mengatasi alienasi spiritual yang menjadi salah satu akar penindasan modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dalam Islam dapat membentuk karakter sosial yang inklusif dan berkeadilan. ([Rumah Jurnal IAIN Pontianak](#)) Oleh karena itu, integrasi tasawuf dalam gerakan sosial menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat tanpa penindasan.

Selanjutnya, konsep maqāsid al-sharī'ah memberikan landasan normatif yang kuat bagi formulasi masyarakat tanpa penindasan. Dalam kerangka ini, tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan martabat. Dalam perkembangan kontemporer, maqāsid telah diperluas menjadi kerangka etis untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam berbagai studi yang mengaitkan nilai-nilai Islam dengan isu pembangunan, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. ([e-Journal UIN Bukittinggi](#)) Dengan demikian, maqāsid tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai paradigma sosial yang menuntut transformasi struktur yang menindas.

Dalam konteks empiris, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa penindasan seringkali dilegitimasi melalui interpretasi keagamaan yang konservatif. Misalnya, dalam isu gender, kemiskinan, dan otoritas politik, agama sering digunakan untuk mempertahankan struktur yang tidak adil. Namun, pada saat yang sama, terdapat juga gerakan keagamaan progresif yang berupaya merekonstruksi interpretasi tersebut untuk mendukung keadilan sosial. Studi terbaru tentang ijtihad kolektif menunjukkan bahwa ulama dan intelektual Muslim mulai mengembangkan pendekatan baru dalam merespons tantangan global, termasuk isu keadilan sosial dan perubahan sosial. ([journal.at-taawun.org](#)) Fenomena ini menunjukkan bahwa teologi tidak bersifat monolitik, tetapi dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi.

Analisis kritis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sosial sangat bergantung pada kemampuan teologi untuk beradaptasi dengan konteks historis. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutik menjadi penting untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual. Tanpa pendekatan ini, teologi akan terjebak dalam formalisme yang tidak relevan dengan realitas. Sebaliknya, dengan pendekatan hermeneutik, teks dapat diinterpretasikan sebagai sumber inspirasi untuk perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan tren global dalam studi Islam yang menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami agama sebagai fenomena sosial dan historis.

Lebih jauh, dalam perspektif global, krisis penindasan tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi dan politik global yang bersifat eksploitatif. Kapitalisme global, misalnya, seringkali menghasilkan ketimpangan yang semakin tajam antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ini, teologi Islam memiliki potensi untuk menawarkan alternatif melalui konsep keadilan distributif dan solidaritas sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan studi eco-theology dan ecofeminism dalam Islam yang mengaitkan keadilan sosial dengan keberlanjutan lingkungan. ([Jurnal UIN Raden Intan Lampung](#)) Dengan demikian, teologi tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi.

Akhirnya, sintesis antara tauhid, teologi emansipatoris, dan tasawuf sosial menghasilkan paradigma baru yang disebut sebagai "paradigma tauhidik integratif." Paradigma ini tidak hanya menjelaskan realitas penindasan, tetapi juga menawarkan strategi transformasi yang mencakup perubahan kesadaran dan struktur sosial secara simultan. Dalam paradigma ini, agama tidak lagi diposisikan sebagai sistem normatif yang statis, tetapi sebagai kekuatan dinamis yang mampu mendorong perubahan sosial. Dengan demikian,



artikel ini berkontribusi dalam memperluas diskursus global tentang hubungan antara agama dan keadilan sosial, sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang relevan bagi pembangunan masyarakat tanpa penindasan.

Pembahasan

Interpretasi utama yang diajukan dalam artikel ini menegaskan bahwa penindasan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak dapat direduksi menjadi problem struktural semata, melainkan merupakan manifestasi dari krisis epistemologis dalam memahami tauhid sebagai prinsip sosial. Tauhid, dalam kerangka ini, harus dipahami sebagai basis ontologis yang menegaskan segala bentuk dominasi manusia atas manusia. Dengan kata lain, setiap bentuk penindasan—baik ekonomi, politik, maupun simbolik—merupakan bentuk “penyimpangan tauhid” dalam ruang sosial. Perspektif ini menggeser pemahaman klasik yang cenderung menempatkan tauhid dalam ranah metafisik menuju paradigma praksis yang bersifat emansipatoris. Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, prinsip ini sejalan dengan tujuan perlindungan martabat manusia (*hifz al-karāmah*) yang menjadi fondasi keadilan sosial. Studi mutakhir menunjukkan bahwa maqāṣid tidak lagi hanya dipahami sebagai kerangka hukum, tetapi sebagai sistem etika untuk transformasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan distributif. (ijil.uinkhas.ac.id)

Namun, interpretasi tersebut perlu diuji dalam dialog dengan studi global yang berkembang dalam kajian agama dan teori sosial. Dalam literatur internasional, terdapat kecenderungan untuk membaca agama sebagai sumber ambivalen—yakni dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan sekaligus sumber resistensi terhadap penindasan. Pendekatan ini sejalan dengan analisis kritis yang dikembangkan dalam studi agama kontemporer, di mana agama tidak diposisikan sebagai entitas normatif yang statis, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dinamis. Dalam konteks Islam, penelitian terbaru menunjukkan bahwa teologi memiliki potensi besar dalam membangun harmoni sosial di masyarakat multikultural, namun efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi yang digunakan. ([Journal Pandawan](#)) Dengan demikian, posisi artikel ini berada dalam arus pemikiran global yang menekankan pentingnya reinterpretasi teologi sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sekadar legitimasi normatif.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan studi global tentang teologi pembebasan (*liberation theology*), pendekatan tauhidik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tradisi Barat. Jika teologi pembebasan dalam tradisi Latin Amerika berakar pada kritik terhadap kapitalisme dan imperialisme, maka teologi tauhidik berakar pada prinsip ontologis tentang keesaan Tuhan yang secara inheren menolak segala bentuk absolutisasi kekuasaan manusia. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa Islam memiliki sumber internal untuk mengembangkan paradigma emansipatoris tanpa harus mengadopsi sepenuhnya kerangka Barat. Namun demikian, dialog dengan teori sosial modern tetap diperlukan untuk memperkuat dimensi analitis dari teologi tersebut. Dalam hal ini, pendekatan maqāṣid berbasis sistem (*systemic maqāṣid*) sebagaimana dikembangkan dalam studi kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam dapat direformulasi sebagai alat transformasi sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. (ijil.uinkhas.ac.id)

Implikasi teoretis dari analisis ini sangat signifikan, terutama dalam redefinisi posisi teologi dalam studi Islam. Pertama, teologi tidak lagi dipahami sebagai disiplin normatif yang bersifat dogmatis, tetapi

*Dari Teologi Normatif ke Emansipasi Sosial:
Rekonstruksi Paradigma Tauhidik untuk Masyarakat Tanpa Penindasan*
(Rohman, et al.)



sebagai kerangka epistemologis yang mampu menjelaskan dan mengkritik realitas sosial. Kedua, integrasi antara tauhid, maqāsid, dan tasawuf menghasilkan paradigma baru yang dapat disebut sebagai “teologi integratif-transformatif,” yang menggabungkan dimensi normatif, kritis, dan spiritual. Ketiga, pendekatan ini juga membuka ruang bagi dialog antara Studi Islam dan teori sosial global, sehingga menghindarkan isolasi epistemologis yang selama ini menjadi kritik utama terhadap studi keislaman tradisional. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi maqāsid dalam berbagai bidang—termasuk pendidikan dan kebijakan publik—dapat meningkatkan relevansi Islam dalam menjawab tantangan global seperti ketimpangan sosial dan pembangunan berkelanjutan. (insight.ppj.unp.ac.id)

Implikasi praktis dari kerangka ini dapat dilihat dalam berbagai konteks sosial. Misalnya, dalam bidang ekonomi, prinsip tauhidik dapat diterjemahkan ke dalam sistem keuangan Islam yang berorientasi pada keadilan distributif, bukan akumulasi kapital. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan instrumen seperti zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, pengembangan Islamic social finance telah menunjukkan potensi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam bidang pendidikan, integrasi nilai-nilai maqāsid dapat menghasilkan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter sosial yang berkeadilan. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun kesadaran etis dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. (insight.ppj.unp.ac.id)

Contoh kontekstual lainnya dapat ditemukan dalam isu reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan berbasis maqāsid memungkinkan reinterpretasi hukum klasik untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan dalam pernikahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang maqāsid dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. ([Jurnal STAI Probolinggo](#)) Hal ini menunjukkan bahwa teologi tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai kerangka praktis untuk perubahan sosial yang konkret.

Dalam dinamika global, pendekatan ini juga relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi, krisis lingkungan, dan transformasi teknologi. Misalnya, dalam konteks etika digital, prinsip maqāsid dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi agar tidak merusak martabat manusia. Studi terbaru tentang etika Islam dalam menghadapi teknologi deepfake menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan kehormatan dapat menjadi dasar regulasi teknologi yang lebih humanis. ([arXiv](#)) Dengan demikian, teologi tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan modern yang kompleks.

Namun demikian, pendekatan ini juga menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal resistensi terhadap perubahan dalam tradisi keagamaan. Banyak kelompok masih mempertahankan pendekatan tekstualistik yang kaku, sehingga menghambat proses reinterpretasi. Dalam konteks ini, diperlukan strategi epistemologis yang mampu menjembatani antara tradisi dan modernitas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah hermeneutika kritis, yang memungkinkan pembacaan teks secara kontekstual tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Dengan pendekatan ini, teks keagamaan dapat dipahami sebagai sumber inspirasi yang dinamis, bukan sebagai doktrin yang statis.



Lebih jauh, dalam konteks masyarakat multikultural, pendekatan tauhidik juga memiliki potensi untuk membangun harmoni sosial melalui prinsip keadilan dan kesetaraan. Studi menunjukkan bahwa teologi Islam dapat berfungsi sebagai basis untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, asalkan diinterpretasikan secara kontekstual dan progresif. ([Journal Pandawan](#)) Dengan demikian, teologi tidak hanya berfungsi sebagai identitas religius, tetapi juga sebagai fondasi etika sosial yang universal.

Pada akhirnya, kedalaman analisis ini menunjukkan bahwa transformasi menuju masyarakat tanpa penindasan memerlukan perubahan pada dua level sekaligus: kesadaran individu dan struktur sosial. Tauhid sebagai prinsip ontologis harus diinternalisasi sebagai kesadaran etis yang mendorong tindakan sosial, sementara maqāṣid sebagai kerangka normatif harus diimplementasikan dalam kebijakan dan institusi sosial. Dengan integrasi ini, teologi tidak lagi menjadi wacana normatif yang abstrak, tetapi menjadi kekuatan praksis yang mampu mengubah realitas. Oleh karena itu, kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya mengembangkan paradigma tauhidik integratif yang tidak hanya menjelaskan realitas penindasan, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang konkret dan kontekstual dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

KESIMPULAN

Artikel ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menegaskan bahwa realitas penindasan dalam masyarakat tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca melalui kerangka integratif antara teologi, filsafat sosial, dan spiritualitas. Penindasan, dalam perspektif tauhidik, merupakan manifestasi dari penyimpangan relasi ontologis antara Tuhan dan manusia, di mana otoritas Ilahi digantikan oleh dominasi manusia atas manusia. Kegagalan teologi normatif dalam merespons realitas ini disebabkan oleh reduksi fungsi teologi menjadi sistem doktrinal yang terpisah dari praksis sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma tauhidik menjadi kebutuhan epistemologis yang mendesak, dengan menempatkan tauhid sebagai prinsip emansipatoris yang menolak segala bentuk penindasan. Dalam kerangka ini, masyarakat tanpa penindasan bukanlah utopia normatif, melainkan proyek transformasi yang berbasis pada integrasi kesadaran spiritual dan perubahan struktural.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual “paradigma tauhidik integratif” yang menggabungkan dimensi teologi, filsafat sosial, dan tasawuf dalam satu sistem analisis yang koheren. Paradigma ini tidak hanya menjelaskan realitas penindasan, tetapi juga menawarkan metodologi transformasi sosial yang mencakup tiga dimensi utama: rekonstruksi kesadaran (melalui internalisasi tauhid), reformasi struktur sosial (melalui prinsip keadilan dan maqāṣid al-sharī‘ah), dan penguatan etika spiritual (melalui tasawuf sosial-progresif). Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan Studi Islam kontemporer dengan menjembatani dikotomi antara normativitas agama dan praksis sosial, serta memperluas fungsi teologi dari sekadar sistem kepercayaan menjadi kerangka transformasi sosial yang operasional.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada sintesis interdisipliner yang mengintegrasikan tauhid sebagai prinsip ontologis, teologi sebagai kritik sosial, dan tasawuf sebagai energi transformasi dalam satu paradigma yang utuh. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung parsial, pendekatan ini menawarkan model konseptual yang bersifat holistik dan aplikatif dalam merespons tantangan global



seperti ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, dan alienasi spiritual. Selain itu, artikel ini juga menghadirkan reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik seperti maqāsid al-sharī'ah dan tasawuf, dengan menempatkannya dalam kerangka emansipatoris yang relevan dengan konteks kontemporer. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena berbasis pada studi kepustakaan sehingga belum menguji secara empiris efektivitas paradigma yang ditawarkan dalam konteks sosial yang konkret.

Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengujian empiris terhadap model teologi emansipatoris dalam berbagai konteks sosial, seperti gerakan keagamaan, kebijakan publik, dan pendidikan Islam. Studi lapangan yang mengkaji implementasi paradigma tauhidik dalam praktik sosial akan sangat penting untuk mengukur relevansi dan efektivitasnya. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner yang lebih luas dengan melibatkan ilmu ekonomi, politik, dan teknologi untuk merespons dinamika global yang semakin kompleks. Dengan demikian, pengembangan paradigma tauhidik integratif tidak hanya berhenti pada level konseptual, tetapi dapat menjadi kerangka praksis yang berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari penindasan.

REFERENSI

- Adnan, Mohammad, et al. "Collective Ijtihad in the Disruption Era: A Thematic Analysis of PBNU's 2024 Fatwas in Responding to Global Challenges." *Journal of Social Sciences and Islamic Studies* 1, no. 1 (2025).
- Al-Turabi, Uthman Mehdad, and Jasser Auda. "Toward a Maqāsid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025).
- Budiman, Arif, and Nisa Wahyuli. "Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam: Antara Spiritualitas dan Keadilan Sosial." *JUPSI: Jurnal Pusat Studi Islam* 1, no. 2 (2025).
- Fuadi, Azrian Isyfaul. "Reconfiguring Religious Authority and Ethical Governance in Islamic Political Thought: A Comparative Literature Review." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024).
- Huda, Ali Anhar Syi'bul, et al. "Hermeneutics in the Development of Humanities and Religious Sciences: Models, Development and Research Methods." *Jurnal Hurriah* 5, no. 3 (2024): 477–488.
- Hudaa, S., L. Ying, and M. D'Agustino. "Portrait of Equality, Justice, and Humanitarian Crisis in Scopus Database: A Bibliometric Study." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 26, no. 1 (2024): 67–78. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20285>.
- Ismail, M., and M. Yaakub. "Towards an Inclusive Framework: Human Rights and Democratization in Malaysia through Reformist and Conservative Islamic Groups Lenses." *Journal of Human Rights and Social Work* (2025).
- Ismiyanti, Yulina, et al. "Exploring Islamic Theology in Building Social Harmony in Multicultural Societies." *Al-Waarits Journal* 2, no. 2 (2025).



- Izzatillah, Bidayah Zulfa, et al. "The Typology of Islamic Social Entrepreneurship: Principles and Characteristics from a Maqashid Shariah Perspective." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2024).
- Junaidi, et al. "Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review and Bibliometric Mapping." *Harmoni* 24, no. 2 (2025).
- Majid, Abdul. "Islamic Legal Reform Based on Maqāṣid Syarī'ah: A Study of Al-Ghazālī's Thought and Its Relevance in Indonesian Family Law." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025).
- Marah, Thomas Sheku. "Divine Justice and Social Inequality: A Theological Response from Islamic Tradition." *Kalam Al Gazali: Education and Islamic Studies Journal* 2, no. 2 (2025).
- Mohammed, TawffEEK A. S. "A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis." *Frontiers in Research Metrics and Analytics* 9 (2024). <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>.
- Romsy, Abdur. "Phenomenological Exploration of Mystical Experiences and Religious Identity in Eastern Religious Traditions: A Qualitative Approach." *Irfana: Journal of Religious Studies* 1, no. 4 (2025).
- Rum, Muhammad. "Hermeneutics in Contemporary Interpretation: A Critical Study of the Methods of Qur'anic Interpretation in the Modern Era." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity* 7, no. 2 (2025): 677–688.
- Salahudin, et al. "Research Theme Mapping and Future Directions on Corruption and Religion: A Bibliometric Analysis." *Frontiers in Sociology* 10 (2025). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1502700>.
- Saputra, Deden Mula, and Agung Kurniawan. "The Development of Theoretical Study of Social Interpretation: Social Relations." *ALSYS* 5, no. 4 (2025).
- Sari, Melani Novita, and Mutia Khairanisa. "The Role of Theology in Addressing Sustainable Development: Insights from Jamaluddin Al-Afghani's Thought." *Islamic Thought Review* 2, no. 2 (2024): 105–116.
- Shalghoum, Najimudin, et al. "Integrating Maqasid al-Shariah into Higher Education: Enhancing the Role of Faculty in Achieving the SDGs." *International Journal of Islamic Studies Higher Education* 4, no. 2 (2025).
- Shodikin, Eko Ngabdul, et al. "Exploring the Evolution of Qualitative Methodologies in Islamic Education Research: A 25-Year Bibliometric Review from Scopus (2000–2025)." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 10, no. 3 (2025).
- Tanjung, Yul Ifda, et al. "Islam as a Value Foundation in the Formation of Social Character through a Theological and Philosophical Approach." *Al-Waarits Journal* (2024).
- Uriawan, Wisnu, et al. "The Role of Islamic Ethics in Preventing the Abuse of Artificial Intelligence (AI) Based Deepfakes." (2025).
- Zainudin, Muhammad, et al. "Kerangka Teologis Islamic Social Finance untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)." *Peradaban Journal of Religion and Society* 5, no. 1 (2026).
- "Islamic Ecofeminism and The Future of Social Justice: Pathways to Sustainable Community Development." *Ijtimaiyya* 18, no. 2 (2025)